



LAPORAN HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK

**PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SEKTOR PELAYANAN PUBLIK**

**PENYELENGGARA:
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



SELASA, 11 AGUSTUS 2026

**TEMPAT: RUANG STUDIO, GEDUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU, TANJUNGPINANG**

DAFTAR ISI

COVER.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan Pelaksanaan FKP	3
3. Ruang Lingkup	4
BAB II METODE PELAKSANAAN FKP	5
1. Sumber Input dan Tema FKP	5
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
3. Penyelenggara dan Peserta FKP	6
4. Metode Pelaksanaan FKP	7
BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP	9
1. Identifikasi Masalah	9
2. Analisis	10
3. Rencana Aksi	12
BAB IV PENUTUP	16
LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	18
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR.....	24
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN	26
LAMPIRAN V. DOKUMENTASI SPANDUK DAN FLYER	29
LAMPIRAN VI. DOKUMENTASI KEGIATAN	30
LAMPIRAN VII. TAUTAN PUBLIKASI	33

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan amanat tersebut adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP merupakan kegiatan dialog dua arah antara penyelenggara layanan dan publik. Forum ini membahas berbagai hal penting, seperti rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan, serta permasalahan terkait pelayanan publik. Melalui forum ini, publik selaku pengguna layanan dapat mengusulkan, memberikan masukan, dan menyampaikan saran kepada penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggaraan FKP memberikan manfaat besar, baik bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Bagi penyelenggara, forum ini berfungsi menjaring masukan publik sejak proses perumusan hingga evaluasi kebijakan, menyosialisasikan kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi kualitas pelayanan. Di sisi lain, publik dapat memanfaatkan FKP sebagai wadah partisipasi, media edukasi terkait kebijakan pelayanan, dan sarana memperoleh kepastian layanan melalui fungsi pengawasan. Selain itu, FKP menjadi instrumen strategis bagi penyelenggara untuk menyelaraskan kemampuan dengan harapan masyarakat, sekaligus meminimalkan dampak kebijakan yang berpotensi merugikan. Atas dasar manfaat tersebut, penyelenggaraan FKP menjadi sangat penting untuk diterapkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Pelaksanaan FKP

Tujuan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik dengan tema “Penguatan Ekosistem Literasi Menuju Masyarakat Cerdas”, Mewujudkan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Yang Partisipatif, Transparan,

Dan Berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat antara lain :

1. Menghimpun aspirasi, saran, dan masukan konstruktif dari masyarakat serta pemangku kepentingan guna mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan prima pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Memetakan secara komprehensif berbagai kendala, tantangan, dan kebutuhan riil masyarakat dalam mengakses serta memperoleh pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Memperkuat sinergi, kolaborasi, dan kemitraan strategis antara pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan stakeholder terkait demi menciptakan ekosistem pelayanan yang harmonis.
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi perbaikan pelayanan yang mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas yang berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat.
5. Menstimulasi tata kelola pelayanan publik yang inklusif, partisipatif, dan responsif melalui pelebagaan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat secara berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup

Forum Konsultasi Publik (FKP) ini mengulas secara komprehensif berbagai aspek pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Ruang lingkup pembahasan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan berjalan, penjaringan aspirasi, serta identifikasi hambatan teknis yang dihadapi masyarakat selaku pengguna layanan. Melalui forum ini, dirumuskan pula rekomendasi aksi konkret guna memacu peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada aspek partisipasi aktif, transparansi informasi, kemudahan aksesibilitas, serta kecepatan respons tindak lanjut. Lebih dari itu, FKP ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mempererat koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan antara Badan DPK Provinsi Kepulauan Riau dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) demi mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang semakin inklusif dan akuntabel.

BAB II

METODE PELAKSANAAN FKP

1. Sumber Input dan Tema FKP

Dalam upaya berkelanjutan untuk memacu mutu pelayanan publik, **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau** menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang mengusung tema **“Penguatan Ekosistem Literasi Menuju Masyarakat Cerdas”** agar terwujudnya pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang Partisipatif, Transparan, dan Berkualitas. Esensi dari tema strategis ini merefleksikan komitmen mendalam lembaga untuk membangun fondasi pelayanan yang adaptif dan responsif dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat. Melalui pelebagaan forum dialog ini, dinas berupaya mengintegrasikan peran aktif dari berbagai elemen pemangku kepentingan guna mengakselerasi proses perbaikan serta inovasi pelayanan berbasis literasi dan kearsipan secara berkelanjutan.

Penetapan tema strategis tersebut dijustifikasi oleh kompilasi masukan komprehensif serta hasil evaluasi objektif atas performa pelayanan publik yang telah berjalan. Basis data dan sumber input yang digunakan mengintegrasikan indikator kuantitatif dan kualitatif, yang meliputi nilai indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), tabulasi data pengaduan serta aspirasi publik, hasil penjaminan mutu melalui evaluasi internal, hingga sumbang saran lisan maupun tertulis dari masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

Sintesis berbagai informasi strategis tersebut menegaskan pentingnya penguatan komunikasi dua arah dan kemitraan kolaboratif antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam memacu mutu pelayanan publik. Selaras dengan hal tersebut, urgensi penyediaan pelayanan yang memiliki aksesibilitas tinggi, keterbukaan informasi, serta kapasitas respons yang cepat dan adaptif terhadap aspirasi publik ditempatkan sebagai pilar bahasan utama (*core concerns*) dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini.

Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) ini, diharapkan dapat terbangun ruang dialog dua arah yang efektif dan konstruktif antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat. Sinergi ini ditargetkan mampu menghasilkan rumusan masukan strategis, rekomendasi kebijakan, serta rencana aksi perbaikan nyata demi mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pemenuhan kebutuhan Serta kemaslahatan publik.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Agustus 2026

b. Tempat Pelaksanaan : Ruang Studio, Perpustakaan Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.

3. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang mengusung tema “Penguatan Ekosistem Literasi Menuju Masyarakat Cerdas”, Mewujudkan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Yang Partisipatif, Transparan, Dan Berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Hal ini diinisiasi dan diselenggarakan secara resmi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau sebagai wujud komitmen peningkatan mutu layanan literasi daerah.

b. Peserta FKP

Peserta Forum Konsultasi Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

A. Perwakilan Unsur Perangkat Daerah

1. Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bintan
4. Mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang

B. Perwakilan Unsur Organisasi

1. Pengurus Dewan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau;

2. Pengurus Wilayah Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Kepulauan Riau;
 3. Pengurus Wilayah Ikatan Pustakawan (IPI) Provinsi Kepulauan Riau;
 4. Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Provinsi Kepulauan Riau;
- C. Perwakilan Unsur Media
1. Stasiun TVRI Provinsi Kepulauan Riau;
 2. LPP RRI Tanjungpinang;
 3. Harian KEPRI
- D. Perwakilan Unsur Akademisi
1. Dr. Drs. Atmadinata.M.Pd.
 2. Dr. Encik Abdulhajar, .M.M.
 3. Dr. Ari Basuki.M.Pd. M.Si.
 4. Muhammad Syukur,S.H.
 5. Sabra Nanda. M.Pd.I.
 6. Agus Andreano, S.E., M.A.P.

4. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan secara tatap muka (luring) sebagai media komunikasi, koordinasi, dan konsultasi taktis antara penyelenggara dengan pengguna layanan serta pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Pilihan metode ini ditujukan untuk membangun ruang dialog interaktif yang inklusif, sehingga dapat menstimulasi pertukaran informasi, penjangkaran aspirasi, serta penyampaian sumbang saran secara langsung demi mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan berjalan melalui format yang terstruktur dan sistematis, diawali dengan pemaparan mengenai profil layanan aktual serta rencana inovasi pelayanan yang telah dan akan diimplementasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Sesi berikutnya membuka ruang bagi seluruh peserta untuk menyampaikan tanggapan kritis, masukan konstruktif, serta rekomendasi strategis melalui forum diskusi dan dialog interaktif yang dipandu secara terarah oleh moderator.

Pelaksanaan konsultasi melalui metode tatap muka dinilai jauh lebih efektif karena membuka ruang untuk klarifikasi, pendalaman materi, serta pembahasan isu pelayanan secara komprehensif. Segenap hasil diskusi dan masukan konstruktif dari para peserta kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi strategis. Seluruh poin tersebut dituangkan ke dalam berita acara sebagai dokumen otentik yang berfungsi sebagai bahan evaluasi sekaligus rujukan perbaikan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara tatap muka diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan ini menjadi kunci utama dalam mendukung tata kelola pelayanan publik yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan prima di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Melalui sinergi yang terbangun, kualitas layanan literasi dan kearsipan bagi masyarakat Kepri dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Dalam rangka pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), dilakukan identifikasi terhadap berbagai aspek pelayanan yang memerlukan perhatian dan penyempurnaan. Identifikasi masalah ini diperoleh melalui evaluasi internal penyelenggara layanan, masukan dari pengguna layanan, serta hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan masukan yang diberikan oleh peserta Forum Konsultasi Publik bersama pemangku kepentingan terdapat beberapa masukan sebagai berikut :

1. Informasi mengenai layanan DPK seperti layanan Kearsipan belum sepenuhnya diketahui masyarakat.
2. Pengelolaan arsip statis bernilai guna sejarah masih terbatas karena kendala anggaran.
3. Penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna Sejarah belum dilaksanakan secara masif.
4. Pemanfaatan layanan PPID Online belum optimal
5. Belum seluruh masyarakat mengetahui mekanisme penyampaian pengaduan pelayanan.
6. Koordinasi antar pemangku kepentingan TBI, RELIMA dan Pegiat Literasi masih perlu ditingkatkan.
7. Literasi masyarakat mengenai minat baca dan Pengamanan Arsip Keluarga masih perlu diperkuat dan sosialisasi.
8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum sepenuhnya mencerminkan masukan masyarakat secara luas.
9. Belum seluruh layanan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mudah dipahami masyarakat.
10. Penyampaian informasi kegiatan strategis belum terdokumentasi secara optimal.
11. Inovasi pelayanan publik perlu terus dikembangkan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Analisis

Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP), berbagai masukan yang disampaikan oleh peserta menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan agar pelayanan semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1. informasi mengenai layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang memadai mengenai jenis layanan, persyaratan, prosedur, serta inovasi pelayanan yang tersedia. Kurangnya akses informasi berpotensi menghambat pemanfaatan layanan oleh masyarakat.
2. Keterbatasan anggaran pada lembaga kearsipan secara sistemik menghambat seluruh siklus pengelolaan arsip statis bernilai sejarah, mulai dari minimnya proses akuisisi (penyelamatan) dokumen dari masyarakat, buruknya fasilitas preservasi fisik dan digitalisasi untuk mencegah kerusakan kertas, hingga kurangnya pelatihan bagi tenaga arsiparis profesional. Akibatnya, pembuatan sarana bantu penemuan arsip (*Guide Arsip*) menjadi terhambat, yang pada akhirnya mempersulit akses publik, menghambat riset sejarah primer, dan mengancam hilangnya memori kolektif bangsa.
3. Belum masifnya penyelamatan arsip bernilai sejarah disebabkan oleh lemahnya sinergi regulasi, keterbatasan kompetensi SDM (arsiparis) di daerah, serta rendahnya kesadaran (*awareness*) instansi publik dan masyarakat untuk menyerahkan dokumen penting mereka ke lembaga kearsipan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya program "jemput bola" dan sosialisasi, sehingga banyak dokumen primer yang bernilai historis tinggi telanjur rusak, hilang, atau musnah sebelum sempat diakuisisi. Akibatnya, negara kehilangan bukti otentik masa lalu yang krusial untuk rekonstruksi sejarah, penegakan hukum, dan pelestarian identitas budaya nasional.
4. pemanfaatan layanan PPID Online belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan informasi publik secara elektronik sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi,

- kemudahan akses, serta penyempurnaan pengelolaan layanan informasi publik.
5. masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui mekanisme penyampaian pengaduan pelayanan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan publikasi mengenai saluran pengaduan yang tersedia agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, saran, maupun pengaduan secara mudah dan tepat.
 6. Kebutuhan peningkatan koordinasi antara TBI, RELIMA, dan Pegiat Literasi bersumber dari belum padunya penyelarasan program kerja serta belum tersedianya wadah komunikasi formal yang terintegrasi. Kondisi ini berpotensi memicu pemusatan kegiatan budaya baca di wilayah tertentu, sehingga jangkauan manfaat literasi belum terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Melalui penguatan sinergi, penyusunan database bersama, dan pembagian peran yang berbasis kolaborasi, ketiga pilar ini dapat saling melengkapi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, sekaligus memperluas dampak gerakan literasi secara lebih inklusif dan berkelanjutan.
 7. Kebutuhan penguatan literasi dan sosialisasi ini bersumber dari masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menumbuhkan budaya membaca sekaligus memitigasi risiko kerusakan dokumen penting rumah tangga. Banyak keluarga belum memahami teknik dasar perlindungan dokumen vital seperti akta kelahiran, sertifikat tanah, dan ijazah dari ancaman bencana alam, kelaparan, atau kelalaian fisik. Melalui pendekatan sosialisasi yang edukatif, persuasif, dan berbasis komunitas, masyarakat dapat didorong untuk mengadopsi kebiasaan membaca sejak dini sekaligus menerapkan metode pengamanan arsip mandiri, termasuk alih media digital, guna melindungi hak keperdataan keluarga dan menyelamatkan memori kolektif sejak dari lingkup terkecil.
 8. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dinilai belum sepenuhnya mampu menjaring masukan dari seluruh kelompok pengguna layanan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan metode survei yang lebih mudah diakses, partisipatif, dan mampu menggambarkan persepsi masyarakat secara lebih komprehensif.
 9. belum seluruh layanan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mudah dipahami oleh masyarakat. Penyajian SOP yang sederhana, jelas, dan mudah diakses menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepastian pelayanan dan meminimalkan kesalahan informasi.

10. penyampaian informasi mengenai kegiatan strategis belum terdokumentasi secara optimal. Dokumentasi dan publikasi yang baik diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat.
11. inovasi pelayanan publik perlu terus dikembangkan agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Pengembangan inovasi secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi penyelenggaraan tugas, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan yang diidentifikasi tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pelayanan, tetapi juga menyangkut komunikasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan inovasi pelayanan. Oleh karena itu, seluruh masukan yang diperoleh melalui Forum Konsultasi Publik menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi perbaikan pelayanan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang semakin partisipatif, transparan, responsif, akuntabel, dan berkualitas.

3. Rencana Aksi

Sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan, saran, dan rekomendasi yang diperoleh melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan rencana aksi sebagai berikut

1. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, akan dilakukan optimalisasi penyebaran informasi melalui website resmi, media sosial, media massa, media informasi digital, serta kegiatan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap mengenai jenis layanan, persyaratan, prosedur, dan inovasi pelayanan.
2. Penerapan skala prioritas akuisisi dokumen sejarah yang paling vital, optimalisasi digitalisasi mandiri menggunakan perangkat yang ada, serta pengajuan dana hibah ke lembaga kearsipan pusat (ANRI) atau pemanfaatan

dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) swasta untuk modernisasi ruang preservasi. Selain itu, lembaga perlu menyelenggarakan pelatihan arsiparis secara daring atau berbasis komunitas yang efisien biaya, serta menyusun sarana bantu penemuan arsip (*Guide Arsip*) digital skala mikro secara bertahap guna mempermudah akses riset publik dan menyelamatkan memori kolektif bangsa di tengah keterbatasan anggaran

3. pada penguatan regulasi lokal yang mewajibkan penyerahan arsip sejarah, pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kompetensi arsiparis daerah secara berkala, serta penggalakan kampanye sosialisasi gerakan sadar arsip kepada instansi publik dan masyarakat luas. Langkah ini dibarengi dengan peluncuran program "jemput bola" secara terjadwal untuk memburu dokumen primer di lapangan, penyediaan saluran pengaduan/penyerahan arsip berbasis digital yang mudah diakses, serta kolaborasi bersama komunitas sejarah lokal guna mempercepat akuisisi dan penyelamatan bukti otentik masa lalu demi kelestarian identitas budaya nasional.
4. Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, akan dilakukan optimalisasi pengelolaan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui pembaruan informasi secara berkala, peningkatan kualitas PPID Online, penyediaan informasi berbasis QR Code, serta penyebaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang mudah diakses masyarakat.
5. Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap mekanisme penyampaian pengaduan pelayanan, akan dilakukan penguatan dan sosialisasi berbagai kanal pengaduan, antara lain SP4N LAPOR!, website, surat elektronik, hotline pelayanan, media sosial, dan QR Code pengaduan sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, saran, maupun pengaduan secara mudah, cepat, dan transparan.
6. Kegiatan Forum Konsultasi Publik sebagai wadah konsolidasi rutin, pembangunan platform database digital bersama untuk memetakan sebaran wilayah kerja, serta penyusunan peta jalan (*roadmap*) kolaborasi guna menyelaraskan program kerja tahunan. Langkah ini dibarengi dengan pembagian peran yang berbasis kompetensi masing-masing pilar seperti pengadaan logistik buku oleh TBI, mobilisasi sukarelawan oleh RELIMA, dan eksekusi kegiatan kreatif oleh Pegiat Literasi sehingga penumpukan gerakan di satu wilayah dapat dihindari dan perluasan dampak budaya baca dapat

terdistribusi secara merata, inklusif, serta berkelanjutan.

7. Melalui penyelenggaraan program kampanye berbasis komunitas, yaitu "Keluarga Gemar Membaca" dan "Gerakan Sadar Arsip Keluarga" yang mengintegrasikan penyuluhan minat baca dengan pelatihan praktis perlindungan dokumen vital. Langkah konkret difokuskan pada edukasi teknik laminasi dingin, penggunaan wadah antipolusi/antibencana, serta penyediaan aplikasi pemindaian gratis untuk alih media digital (kamera *smartphone* ke *cloud storage seperti Google Drive*). Sosialisasi ini diperkuat melalui keterlibatan aktif para pegiat literasi dalam merangkul kader PKK dan RT/RW dalam memberikan edukatif, sehingga setiap rumah tangga mampu menumbuhkan budaya literasi sekaligus melindungi hak keperdataan keluarga secara mandiri sejak dini.
8. Sebagai upaya meningkatkan kualitas evaluasi pelayanan, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) akan terus disempurnakan melalui pengembangan survei digital berbasis QR Code, perluasan jangkauan responden, pemanfaatan dashboard evaluasi pelayanan, serta tindak lanjut hasil survei sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan.
9. Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, akan dilakukan penyusunan, penyempurnaan, serta publikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh layanan dalam bentuk yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah diakses melalui website resmi maupun ruang pelayanan.
10. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, akan dilakukan pengembangan dokumentasi kegiatan melalui dashboard informasi, infografis, publikasi kegiatan, laporan kinerja berbasis digital, serta pembaruan informasi secara berkala.
11. Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau akan terus mengembangkan berbagai inovasi pelayanan berbasis digital maupun non-digital melalui evaluasi hasil Forum Konsultasi Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, serta masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sehingga pelayanan menjadi semakin adaptif, responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui pelaksanaan sebelas rencana aksi tersebut, diharapkan seluruh identifikasi masalah yang diperoleh melalui Forum Konsultasi Publik dapat

ditindaklanjuti secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang partisipatif, transparan, responsif, akuntabel, dan berkualitas.

BAB IV

PENUTUP

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu implementasi nyata dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui forum ini, berbagai aspirasi, masukan, kritik, serta rekomendasi dari masyarakat dan para pemangku kepentingan berhasil dihimpun sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam penyempurnaan kebijakan maupun peningkatan kualitas pelayanan yang diselenggarakan.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan tema **"Penguatan Ekosistem Literasi Menuju Masyarakat Cerdas"** menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media, serta seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang terbangun melalui forum ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai gagasan dan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, responsif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi yang telah disepakati dalam Forum Konsultasi Publik secara bertahap, terukur, dan berkesinambungan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau akan terus mendorong budaya kerja yang profesional, berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Ke depan, Forum Konsultasi Publik akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai media dialog, evaluasi, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau meyakini bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat

terwujud melalui keterbukaan, kolaborasi, dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh hasil Forum Konsultasi Publik ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan pelayanan, sehingga mampu memberikan manfaat yang nyata, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang semakin partisipatif, transparan, profesional, dan berkualitas.

LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Gedung Raja Muhammad
Jalan Basuki Rahmat Nomor 01, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dispusarsip@kepriprov.go.id, Laman : www.dpk.kepriprov.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau bertempat di Ruang Studio Lantai 2 Perpustakaan Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi Provinsi Kepulauan Riau.

Setelah Memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan tentang FKP yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Tanggapan dan saran dari peserta FKP yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau;

Maka Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026

Menyepakati

- KESATU : Rancangan Tema dan Prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 tercantum dalam LAMPIRAN Berita Acara ini.
- KEDUA : Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 tercantum dalam LAMPIRAN Berita Acara ini.
- KETIGA : Berita Acara ini Beserta Lampiran Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KEDUA Dijadikan Sebagai Bahan Penyempurna Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 11 Agustus 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau


Dr. Moh. Bishri, S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001

**RANCANGAN TEMA DAN PRIORITAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2027**

- I. Rancangan Tema Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027:
"KEPRI PAHAM BERLITERASI DAN KEARSIPAN MENJAGA INGATAN SEJARAH"
- II. Rancangan Prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027
 1. Melaksanakan Program Sedekah Buku
 2. Bekerjasama dengan Pengusaha Kafe dalam menyediakan pojok baca dan bahan koleksinya akan disuport oleh DPK
 3. Bekerjasama dengan Disdik Prov Kepri dalam merangkul Guru-guru dan Pelajar dalam peningkatan minat baca.
 4. Terkait kearsipan akan melakukan pendataan toko-tokoh diprov kepri dengan bekerjasama dengan instansi terkait kemudian membuat video dokumenter terkait sejarah di provinsi kepulauan riau.
 5. Kegiatan library exploler dengan melibatkan sekolah-sekolah di Provinsi Kepulauan Riau.

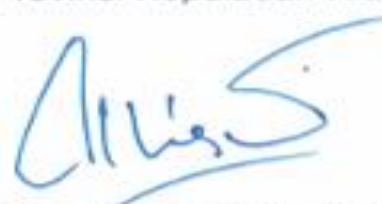
HASIL KESEPAKATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

No	Identifikasi Masalah dan Usulan Rekomendasi Perbaikan	Komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
1.	Informasi mengenai layanan DPK belum sepenuhnya diketahui masyarakat.	Meningkatkan publikasi melalui website resmi, media sosial, media massa, serta penyebaran media informasi digital
2.	Proses pelayanan administrasi masih memerlukan penyempurnaan dari sisi digitalisasi	Mengembangkan layanan berbasis elektronik (e-service seperti SIMPEL OM, PPID Online, Buku Tamu Digital dan layanan berbasis QR Code.
3.	Belum seluruh organisasi kemasyarakatan memperbarui data secara berkala	Melaksanakan sosialisasi, pendampingan dan penerapan sistem pembaruan data ormas secara daring.
4.	Partisipasi masyarakat dalam minat baca dan perlindungan arsip keluarga masih perlu ditingkatkan	Menambah kegiatan minat baca dan pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya menjaga arsip keluarga
5.	Pemanfaatan layanan PPID Online belum optimal	Mengoptimalkan penyebarluasan informasi PPID melalui website, QR Code, media sosial dan pelayanan terpadu
6.	Belum seluruh masyarakat mengetahui mekanisme dalam pengaduan terkait pelayanan	Memperkuat integrasi layanan SP4N-LAPOR!, Hotline pengaduan, website,
7.	Disampaikan bahwa konsep perpustakaan saat ini masih bersifat konservatif, sehingga kurang menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Menanggapi hal tersebut, DPK merumuskan pendekatan strategis guna meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya Generasi Z. Strategi ini dilakukan melalui modernisasi pelayanan literasi yang dipadukan dengan pengangkatan unsur budaya Melayu setempat.	Kepala DPK telah melakukan koordinasi awal dengan Ketua Persatuan Pemilik Kafe di Tanjungpinang mengenai rencana penyediaan pojok baca di sektor usaha kuliner. Dalam pertemuan tersebut, DPK menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan koleksi bahan bacaan secara berkala. Selain itu, disepakati pula adanya komitmen bersama bahwa para pelaku usaha kafe turut bertanggung jawab secara aktif dalam menggerakkan dan mengembangkan minat baca masyarakat di lingkungan usaha mereka.
8.	Untuk mengatasi kurangnya pengunjung di perpustakaan, disarankan agar DPK menjalin kerja sama dengan <i>influencer</i> lokal dan pemilik kafe. Kolaborasi ini bertujuan untuk membangun opini publik yang positif serta mengampayekan gerakan gemar membaca buku di tengah masyarakat.	Kepala DPK menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pihak <i>influencer</i> saat ini masih terkendala oleh keterbatasan anggaran daerah. Sebagai solusi alternatif, Kepala DPK meluncurkan program inovatif "Sedekah Buku" yang difasilitasi langsung oleh DPK. Melalui program ini, buku-buku yang terkumpul dari gerakan sosial tersebut akan didistribusikan ke berbagai kafe, ruang pelayanan publik, serta pusat keramaian (<i>hangout spots</i>) yang sering dikunjungi oleh masyarakat dan Generasi Z guna memperluas akses literasi secara swadaya.
9.	Disampaikan bahwa DPK belum optimal bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan	Meskipun saat ini DPK telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Riau, kolaborasi formal dengan Dinas Pendidikan (Disdik)

	Pemprov Kepri, khususnya Dinas Pendidikan. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan dinilai strategis untuk menghimbau guru dan pelajar agar terlibat aktif dalam pencapaian target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) serta pembentukan karakter yang berbudi pekerti. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mempermudah DPK dalam menjangkau wilayah kabupaten dan desa terpencil, mengingat kendala keterbatasan anggaran dan tantangan geografis Provinsi Kepri yang berbentuk kepulauan.	Provinsi Kepri diakui belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, forum menyepakati usulan perluasan kemitraan dengan Disdik Provinsi Kepri sebagai masukan strategis yang akan segera diakomodasi dan direalisasikan dalam program kerja terdekat.
10.	Disampaikan bahwa DPK perlu mendekatkan akses perbukuan ke dalam ruang pelayanan publik tanpa perlu mengkhawatirkan risiko buku rusak, kotor, atau hilang, demi membangun kebiasaan membaca di tengah masyarakat. Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan (AI) harus disikapi sebagai mitra pendukung untuk meningkatkan literasi di Provinsi Kepulauan Riau, bukan sebagai ancaman. Di bidang kearsipan, DPK diimbau untuk segera melakukan wawancara sejarah lisan dengan tokoh-tokoh daerah guna menyelamatkan dan menjaga memori kolektif sejarah Provinsi Kepulauan Riau.	DPK akan melaksanakan program kemitraan dengan mendistribusikan sejumlah koleksi buku kepada para pengusaha kafe lokal guna menyediakan sudut baca (<i>reading corner</i>) yang representatif bagi pengunjung. Langkah strategis ini bertujuan untuk mendekatkan akses bacaan sekaligus menumbuhkan budaya membaca di ruang publik yang kasual. Di samping itu, pada bidang kearsipan, DPK akan segera melakukan inventarisasi dan pendataan tokoh-tokoh kunci di Provinsi Kepulauan Riau untuk pelaksanaan wawancara sejarah lisan demi menyelamatkan serta melestarikan memori kolektif daerah.
11.	Disampaikan perlunya penyesuaian bantuan buku agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil pemakai. Selain itu, dievaluasi bahwa selama ini DPK belum pernah memberikan penghargaan kepada masyarakat baik kategori pelajar maupun umum yang aktif berkunjung dan membaca di perpustakaan. Pemberian apresiasi ini disarankan untuk segera diimplementasikan guna memotivasi peningkatan minat baca daerah.	DPK akan melakukan validasi dan pendataan kebutuhan terlebih dahulu sebelum menyalurkan bantuan buku agar bantuan tersebut tepat sasaran. Selain itu, DPK berkomitmen untuk menyusun skema pemberian penghargaan (<i>reward</i>) secara berkala bagi pemustaka aktif yang dikategorikan berdasarkan kelompok pelajar/mahasiswa dan masyarakat umum guna memotivasi minat baca daerah.
12.	Disarankan agar DPK menyelenggarakan berbagai kegiatan kreatif yang menarik dengan merangkul para seniman, penulis, dan pelajar. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan partisipasi aktif masyarakat secara luas.	Program kegiatan "<i>Library Explorer</i>" disepakati sebagai salah satu masukan terbaik dalam Forum Konsultasi Publik. Kegiatan inovatif ini akan dimasukkan ke dalam draf perencanaan strategis dan dijadwalkan untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2027.

PENANDATANGANAN BERITA ACARA

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
A. UNSUR PERANGKAT DAERAH				
1	Jumhari, S.S., M.Hum.	L	Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau;	
2	Novianti, S.Pd.	P	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau;	
3	Hasfi Handra, S.ST.	L	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bintan	
4	Rosi Aryani, S.E.	L	Mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang	
B. PERWAKILAN UNSUR ORGANISASI				
5	Dr. Drs. Atmadinata, M.Pd.	L	Ketua/Pengurus Dewan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau;	
6	Herry Andrianto, S.E., M.M.	L	Ketua/Pengurus Wilayah Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Kepulauan Riau;	
7	Herry Andrianto, S.E., M.M.	L	Ketua/Pengurus Wilayah Ikatan Pustakawan (IPI) Provinsi Kepulauan Riau;	
8	Harken, S.Pd., Ek.	L	Ketua/Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Provinsi Kepulauan Riau;	
C. PERWAKILAN UNSUR MEDIA				
9	Muhammad Ramli Kelwarany, S.M.	L	Mewakili Kepala Stasiun TVRI Provinsi Kepulauan Riau;	
10	Pandu Fikri Tegar Agnianto	L	Mewakili Kepala LPP RRI Tanjungpinang;	
11	Arsih	L	Mewakili Harian KEPRI	

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
D. PERWAKILAN UNSUR AKADEMISI				
11	Dr. Drs. Atmadinata.M.Pd.	L	Perwakilan Akademisi	Unsur 
12	Dr. Encik Abdulhajar, .M.M.	L	Perwakilan Akademisi	Unsur 
13	Dr. Ari Basuki.M.Pd. M.Si.	L	Perwakilan Akademisi	Unsur 
14	Muhammad Syukur,S.H.	L	Perwakilan Akademisi	Unsur
15	Sabra Nanda. M.Pd.I.	L	Perwakilan Akademisi	Unsur 
16	Agus Andreano, S.E., M.A.P.	L	Perwakilan Akademisi	Unsur 
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		
				
Dr. Moh. Bisri, S.K.M., M.Kes. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP 197101091995011001		Dr. Hj. Sulastri, M.Si Pembina Tk.I (IV/b) NIP 197001202002122002		

LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR



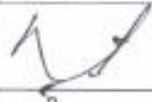
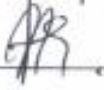
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Gedung Raja Muhammad
Jalan Basuki Rahmat Nomor 01, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dispusarsip@kepripov.go.id, Laman : www.dpk.kepripov.go.id

Acara : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

Hari/Tanggal : Selasa / 11 Agustus 2026

NO	NAMA	L/P	JABATAN	NOMOR HP	INSTANSI	PARAF
1	Sabrananda Satria	L	Kepsek	081365707429	SMPIT Tunas Lmb	
2	Herry Sanj	L	kadisbud	08117096500	Disbud &	
3	gumhari	L	rs. Puri	0812652	B. Lee	
4	Rizky Mauldani	P	Staf BPK	082283754043	BP Kebudayaan	
5	Serryani	P	Staf BPK	085604500028	Bp Kebudayaan	
6	ATMA DINATA	L	Ketua Dewan Perpustakaan Kepri	0811705245	Organisasi	
7	SENDY	L	KETUA HARIMU AAI WIL KEPRI	085381906600	AAI WILAYAH KEPRI	
8	Isdi	P			TURI Kepri	
9	Hannen	L	Ketua	081266		
10	Noviant	P	WD. Ahi. Mnd	081341433192	Kantor Bahasa Kepri	
11	Dr Ari Baubk	L	DORAN	081276541661	UMPAH	
12	HASFI HARA	L	kdu	082385622892	OPAD Bintan	
13	M. Dahi F	P	Staf	082283045932	OPAD Bintan	
14	Livia Putri K	P	Dura Genre	082162115244	Forum Genre	
15	M. Ramli Feluzany	L	KTU TURI Kepri			
16	Valdi & Isdi	P/L	TURI Kepri			

17	KATYMAN	L	AAI			
18	Lino e	L	Anggota		AAI	
19	Egi Gila	L	IPI			
20	IDAR	P	DPK			
21	Yuni	P	DPK			
22	R. Astiana	P	DPK			
23	Herlino	P	DPK			
24	Raja Nazilah	P	DPK			
25	Novitra Valentina	P	DPK			
26	Posia	P	DPK			
27	ACIT Mary	L	BLK			
28	Pandu	L	RRI TPI			
29	ARSIH	L	HARIANWEPRI			
30	ADRI ANDREANO	L	DPK			

LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Gedung Raja Muhammad
Jalan Basuki Rahmat Nomor 01, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dispusarsip@kepriprov.go.id, Laman : www.dpk.kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 10 Agustus 2026

Nomor : B/000.8.3.4/2/DPK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Yth. Daftar Terlampir
di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta mempedomani ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau bermaksud menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik pada:

hari : Selasa
tanggal : 11 Agustus 2026
waktu : 08.30 s.d. 11.00 WIB
tempat : Ruang Studio Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepri
tema : Forum Konsultasi Publik Penguatan Ekosistem Literasi Menuju Masyarakat Cerdas.

FKP merupakan kegiatan komunikasi dua arah (dialog) antara pengguna layanan dan unsur terkait dapat memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan atas layanan yang diterima. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara (Ketua atau Anggota) untuk dapat hadir memberikan saran dan masukan guna optimalisasi penguatan ekosistem literasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Jepri, M.Pd., P.hD (08126165270).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau,



Dr. Moh. Bisri, S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Lampiran I : Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : B/000.8.3.4/2/DPK/2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

DAFTAR UNDANGAN

A. UNSUR PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bintan;
3. Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau;

B. PERWAKILAN UNSUR ORGANISASI

5. Ketua/Pengurus Dewan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Ketua/Pengurus Wilayah Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Kepulauan Riau;
7. Ketua/Pengurus Wilayah Ikatan Pustakawan (IPI) Provinsi Kepulauan Riau;
8. Ketua/Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Provinsi Kepulauan Riau;

C. PERWAKILAN UNSUR MEDIA

9. Kepala Stasiun TVRI Provinsi Kepulauan Riau;
10. Kepala LPP RRI Tanjungpinang;

D. PERWAKILAN UNSUR AKADEMISI

11. Dr. Drs. Atmadinata.M.Pd;
12. Dr. Encik Abdulhajar, M.M;
13. Dr. Ari Basuki.M.Pd. M.Si;
14. Muhammad Syukur,S.H;
15. Sabra Nanda. M.Pd.I;
16. Agus Andreano, S.E., M.AP.

LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI SPANDUK DAN FLYER



LAMPIRAN V. DOKUMENTASI KEGIATAN







LAMPIRAN VI. TAUTAN PUBLIKASI



FKP DPK Dorong Penguatan Ekosistem Literasi melalui Jaring Aspirasi Publik Lewat Forum Strategis, Sumber: <https://rri.co.id/tanjungpinang/regional/2644024/fkp-dinas-perpustakaan-dan-kearsipan-kepri-dorong-penguatan-ekosistem-literasi>



FKP DPK Dorong Penguatan Ekosistem Literasi melalui Jaring Aspirasi Publik Lewat Forum Strategis, Sumber: https://www.instagram.com/reel/DcF_-nmzM08/



FKP DPK Dorong Penguatan Ekosistem Literasi melalui Jaring Aspirasi Publik Lewat Forum Strategis, Sumber: <https://www.youtube.com/shorts/anJEBNIB-UI>